

INDUSTRI PERTAHANAN INDONESIA DAN PRANCIS

Oleh : Elisa Jirey Barus

Email : elisa.jirey3108@student.unri.aci.id

Pembimbing: Ahmad Jamaan, S.IP., M.Si

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This study discusses the development of the defense industry in Indonesia and France. Self-reliance in producing defense equipment is essential in maintaining a country's security. This can be achieved when the country has a defense industry with the technological capacity and ability to produce all the necessary equipment domestically. However, not all countries are capable of meeting their own needs and must cooperate with more advanced countries to develop their defense industries.

The theory used in this study is the typology model of the defense industry. The data used are secondary data derived from books, journals, documents, electronic media, and internet websites. The research method used is qualitative method by analyzing data from the sources mentioned.

The results of this study show that France belongs to the Autarky Model typology where it has become one of the top five global exporters, while Indonesia belongs to the Niche-Production Model. Therefore, Indonesia is seeking cooperation partners that can help develop the capacity and technological advancement of defense equipment domestically. France's progress and willingness to share defense technology make defense cooperation with Indonesia possible.

Keywords: Defense, Defense Equipment, Defense Industry

PENDAHULUAN

Didalam tulisan ini, penulis ingin memaparkan mengenai gambaran umum dari industri pertahanan dan kekuatan militer dari kedua negara ini. Gambaran umum yang dimaksud adalah tentang sejarah perkembangan industri pertahanan Prancis itu sendiri kemudian pengaruh industri ini terhadap pasar Alutsista global. Prancis juga sudah memiliki industri yang mencakup wilayah darat, laut, dan udara dan masing – masing dari industri ini juga akan mendapat penjelasan dalam tulisan ini. Pembahasan terakhir adalah tentang perkembangan industri pertahanan dan perusahaan dalam industri pertahanan di Indonesia.

KERANGKA TEORI

Tulisan ini menggunakan teori tipologi model industri pertahanan. Teori adalah pernyataan yang digunakan untuk menjawab mengapa sebuah fenomena bisa terjadi berdasarkan persepsi dan pengalaman seseorang mengenai hal tersebut.² Dalam artikel berjudul “*Current Trends in Asia Pacific Defense Industries*” yang terdapat dalam *Military Balance* 2009, dijelaskan Ada tiga model dalam membangun industri pertahanan yang mandiri. Pertama, *Autarky*

¹ Rus Nurhadi Sutedjo, “Peningkatan Tata Kelola Industri Pertahanan Guna Mengoptimalkan Fungsi Pertahanan Negara Dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI,” Lembaga Ketahanan Nasional RI, 2014, Hlm 13-14, <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-011600000000287/swf/6122/mobile/index.html#p=1>

² Mohtar Mas’oed, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi* (Jakarta : LP3ES, 1990), hlm. 186.

Model. Model ini dilakukan negara dengan industri dan kapabilitas militer yang dapat memproduksi alutsista secara mandiri dan menguasai ekspor alutsista dunia, seperti Amerika Serikat, China, Rusia, dll. Yang kedua disebut *Global Supply Chain Model*. Model ini dilakukan negara yang telah memiliki perkembangan spesialisasi teknologi militer yang maju namun tidak memiliki akses luas terhadap pasar senjata internasional sehingga menjadi subkontraktor dari negara autarky. Contohnya Australia. Yang terakhir adalah *Niche-Production Model*. Model ini dilakukan oleh negara yang berupaya mengurangi ketergantungan senjata terhadap produsen luar negeri dengan mengembangkan kapasitas nasional sendiri dengan melakukan investasi ke sektor industri pertahanan secara finansial dan mendapatkan akses teknologi melalui alih teknologi dan *offset* dari produsen senjata yang mandiri.

Sedangkan tingkat analisis yang digunakan adalah kelompok. Dalam tingkat ini diyakini bahwa hubungan internasional adalah hubungan antara kelompok kecil di berbagai negara. Sehingga untuk memahami hubungan internasional maka kita harus mempelajari perilaku dari kelompok atau organisasi yang terlibat didalam hubungan internasional.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Industri Pertahanan Prancis

Prancis sebagai salah satu kekuatan besar di Eropa memiliki sejarah panjang dalam perang dan industri pertahanan. Produksi alat perang seperti meriam sudah ada di

³ Mohtar Mas’oed, *ibid.*, hlm. 41

Prancis sejak abad ketigabelas dan pendidikan untuk industri ini juga sudah ada sejak abad ketujuhbelas. Industri pertahanan di masa itu juga sudah melibatkan pihak swasta dalam pengembangan senjata dan mendapat pengawasan serta kerja sama dari pemerintah Prancis sehingga dapat berkembang dengan baik. Inovasi industri dari Inggris dan Amerika Serikat pada akhir abad kesembilan belas telah mendorong Prancis untuk melakukan restrukturisasi dan spesialisasi industri sehingga bisa melakukan produksi senjata secara massal. Pada tahun 1885, dibuat hukum yang disebut *loi Farcy* yang mengizinkan penjualan senjata ke negara luar namun hasilnya masih kurang memuaskan saat itu.⁴

Dalam perang Dunia pertama, kebutuhan dan kondisi perang di kawasan darat, laut serta udara mendorong industri pertahanan Prancis untuk melakukan inovasi teknologi militer sehingga dapat mendukung peperangan bagi Prancis. Perkembangan industri ini diikuti dengan perubahan kebijakan industri guna mendukung militer Prancis sehingga lebih sistematis, terencana, dan terorganisasi, dan diakhir perang dunia pertama Prancis memiliki perkembangan industri pertahanan negara dan swasta yang pesat sehingga mampu mengekspor senjata ke negara aliansi saat itu.

Industri swasta yang berkembang dengan pesat tetap mendapat bimbingan, pengawasan dan perawatan dari pemerintah. Albert Thomas sebagai menteri persenjataan

pertama saat itu membuat kebijakan yang mendorong peran aktif negara dalam industri pertahanan tanpa menggantikan peran swasta, pengadaan kontrak dengan industri swasta, melakukan perencanaan dan pengorganisasian produksi persenjataan skala nasional. Peran negara ini kemudian menjadi pondasi penting dalam struktur industri pertahanan dan peran negara dalam industri pertahanan di masa depan.

Pada tahun 1936, pemerintah menasionalisasikan banyak perusahaan senjata dan mengontrol perusahaan swasta karena tidak dapat memenuhi kebutuhan negara dan untuk mengembangkan program modernisasi persenjataan yang lebih besar. Meskipun begitu, industri pertahanan Prancis sebagian besar tetap terpecah dan tidak mengacu pada kepentingan nasional sehingga terjadi inefisiensi besar akibat perbedaan perspektif dan prioritas antara militer dan pemerintah. Masalah dalam industri persenjataan ini membuat kekuatan militer Prancis menjadi lebih lemah daripada kekuatan militer Jerman dalam perang dunia kedua sehingga Prancis mengalami kekalahan pada tahun 1940.

Setelah perang dunia kedua berakhir, industri dan teknologi Prancis sudah ketinggalan zaman namun berkat bantuan dana dan teknologi dari Amerika Serikat dapat membantu pembangunan teknologi dan kapasitas pertahanan Prancis dalam beberapa tahun setelahnya. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Prancis dari tahun 1945-1947, telah mendorong pengembangan dan penelitian tiap angkatan di kementerian berbeda. Pada tahun 1948, dibentuklah panglima tertinggi dan setiap

⁴ Swedish Ministry of Defence, "The development of the French defence industry in the 20th century," 2005, <https://www.foi.se/rest-api/report/FOI-R--1573--SE>

angkatan menggabungkan strateginya kedalam lembaga ini namun hasilnya industri pertahanan masih belum tersinkronisasi dengan baik dengan setiap angkatan. secara keseluruhan. Setelah itu pada 1950-an, anggaran pertahanan dan beberapa proyek dibidang penerbangan diluncurkan seperti program Jaguar dan Caravelle. Teknologi misil dan nuklir juga berkembang selama kurun waktu ini. Teknologi nuklir sendiri dikembangkan dengan tujuan yang dinamai *force de frappe*, yaitu adanya sebuah kemampuan *counterattack* yang akan membuat negara lain berpikir untuk menyerang Prancis.⁵

Prancis pada akhir tahun 1980-an melakukan restrukturisasi pada industri pertahanannya karena adanya kendala ekonomi di pasar Eropa dan perubahan geopolitik yang merubah kondisi keamanan dunia. Perubahan yang dimaksud seperti bubarnya pakta warsawa yang menghilangkan ancaman dari Soviet ke Eropa kemudian menyatunya Jerman Barat dan Timur dan yang terakhir adalah perang teluk Persia, dimana penggunaan nuklir yang tidak diperbolehkan sehingga membutuhkan kekuatan militer konvensional dalam jumlah besar di luar kawasan Eropa Tengah. Perubahan-perubahan ini menyebabkan penurunan anggaran pertahanan dan angka ekspor senjata dari Prancis. Meskipun anggaran militer Prancis menjadi lebih terbatas, namun upaya modernisasi senjata nuklir masih mendapat dukungan sehingga menyebabkan pengembangan senjata konvensional mengalami penundaan seperti

⁵ Swedish Ministry of Defence, *ibid.*, hlm. 15

pengiriman helikopter anti tank *Tiger* yang ditunda hingga tahun 1999.⁶

Pemerintah Prancis menggabungkan beberapa industri pertahanan yang vital untuk menjaga keamanan nasional dan menjaga pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhan. Industri kedirgantaraan militer dan perangkat elektronik pertahanan yang berkaitan dengan industri pertahanan swasta kemudian menjadikan kontraktor utama dari industri pertahanan yang telah digabungkan menjadi konglomerat besar. Para konglomerat ini kemudian mendominasi bisnis pertahanan domestik di sektor masing - masing, dan mereka adalah satu-satunya pemilik ilmu pengetahuan tentang desain dan integrasi sistem untuk seluruh kategori Alutsista. Contoh industrinya antara lain Dassault Aviation untuk pesawat tempur, Aerospatiale untuk helikopter dan rudal balistik, GIAT Industries untuk tank tempur utama dan artileri, Matra untuk rudal udara-ke-udara.

Industri pertahanan Prancis beberapa dimiliki secara langsung ataupun tidak langsung oleh negara. Kepemilikan ini baik dalam bentuk persenjataan yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah, perusahaan yang dinasionalisasi (misalnya, Aerospatiale, GIAT Industries, dan SNECMA), dan pemerintah memiliki sebagian besar saham perusahaan tersebut (misalnya Dassault Aviation, Matra, dan Thomson Brandt Armaments) Dalam

⁶ U.S. Congress, Office of Technology Assessment, *Lessons in Restructuring Defense Industry: The French Experience*-Background Paper, OTA-BP-ISC-96 (Washington, DC: U.S. Government Printing Office, June 1992) <https://ota.fas.org/reports/9224.pdf> Hlm. 4-5

perkembangannya perusahaan pertahanan Prancis yang dinasionalisasi tidak mendapatkan hambatan yang sama dengan perusahaan swasta dalam pengembalian investasi jangka pendek dan perusahaan nasional ini juga memperoleh pinjaman dan subsidi pemerintah yang tidak akan diterima oleh perusahaan swasta. Namun, perubahan geopolitik dan ekonomi dunia pada akhir 1980-an dan penurunan anggaran pertahanan menyebabkan perusahaan yang dinasionalisasi memiliki modal yang relatif kecil dibandingkan dengan perusahaan swasta.⁷

Pengurangan anggaran pertahanan di Prancis mengakibatkan pengaturan ulang dari lembaga dan perusahaan pemerintah yang bergerak dalam bidang ini. Pada tahun 1997, para konglomerat yang menguasai industri pertahanan swasta melakukan privatisasi dan eropaisasi didalam perusahaan mereka sehingga tercipta perusahaan pertahanan berteknologi tinggi yang baru. Kemajuan ini menciptakan peluang pengembangan kemampuan baru namun lingkungan industri yang belum ikut berkembang dan sumber daya yang terus menipis mendorong industri pertahanan berinovasi pada bidang identifikasi dan pengembangan teknologi canggih.⁸

Perusahaan dalam industri pertahanan Prancis

Perusahaan utama dalam industri pertahanan Prancis antara lain Dassault Aviation, Naval Group, Airbus Group, MBDA, Nexter, Safran dan Thales.⁹ Perusahaan-perusahaan ini meliputi bidang kedirgantaraan, perkapalan, kendaraan tempur dan produksi senjata&rudal.

Industri pertahanan Prancis di pasar global

Pada Januari 2001, Prancis membantu untuk mendirikan Organisasi untuk Kerja sama Persenjataan Gabungan (OCCAR) di Eropa. Organisasi ini didirikan sebagai upaya mengkonsolidasikan kekuatan pertahanan masing-masing negara di Uni Eropa dan juga meningkatkan sinergi proyek nasional dan multinasional mereka. Prancis juga membentuk badan di bidang pengembangan kemampuan pertahanan (*European Defence Agency-EDA*), pada Juni 2003. Badan ini bertugas membantu menyelaraskan kebutuhan persenjataan dan kondisi kerja untuk pasukan reaksi cepat, untuk integrasi angkatan bersenjata Eropa yang lebih menyeluruh. Selain itu, Prancis terlibat dalam banyak program kerja sama pertahanan dengan negara Eropa seperti helikopter Tiger dan NH90, radar Cobra, pesawat angkut Airbus A400M ATLAS dan kapal fregat multipurpose (FREMM).

⁷ U.S. Congress, Office of Technology Assessment, *ibid.*, hlm 8

⁸ Sarah Guillou, Dkk, "The French defence industry in the knowledge management era: A historical overview and evidence from empirical data," *Research Policy*, Volume 38, Issue 1, (2009), Hlm. 171. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048733308002345>

⁹ "Defence industries and technologies," *Ministere De L'Europe Et Des Affaires Etrangeres*, diakses pada 19 Agustus 2022, <https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/economic-diplomacy-foreign-trade/supporting-french-businesses-abroad/strategic-sector-support/defence-industries-and/>

Industri pertahanan dari Prancis sendiri memiliki 5.000 perusahaan dan menyumbang 25% kapasitas industri pertahanan Eropa secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan pengaruh Prancis bersama dengan Jerman dan Inggris dalam penjualan senjata ke seluruh dunia.¹⁰

Untuk memperkuat keamanan NATO dan Eropa dari ancaman yang ada maka Komisi Eropa (EU) telah menyepakati anggaran sebanyak 7 miliar euro dalam pengembangan industri pertahanan dan luar angkasa, Dengan peningkatan anggaran dan program-program baru yang disepakati tentu akan mendukung pertumbuhan industri pertahanan di Eropa khususnya Prancis. selain itu ada juga program pengembangan yang bernama "*Future Air Combat System* (SCAF)" Program ini bertujuan menggantikan pesawat tempur Eurofighters dan Rafale dan program ini dipimpin oleh Prancis, Jerman dan Spanyol. Program ini nantinya akan dikembangkan oleh Airbus dan Dassault Aviation. Terpilihnya dua perusahaan dari Prancis ini menunjukkan pengaruh dan kemampuan industri pertahanan sudah diakui di Eropa.¹¹

Kemajuan industri pertahanan Prancis telah membantu perkembangan ekonomi Prancis dan

memberi daya tawar diplomasi bagi Prancis di kawasan Eropa maupun dunia. Industri pertahanan Prancis sudah menghasilkan peralatan militer canggih dan sistem komunikasi di sektor darat, laut, dan udara dan sudah diekspor ke seluruh dunia. Namun, tingkat ekspor persenjataan Prancis di kawasan Eropa sendiri tidak sebanyak di Asia dan Timur Tengah. Hal ini disebabkan oleh persaingan dengan produsen Amerika Serikat ataupun negara Eropa lainnya, dan hubungan diplomatik Prancis dengan negara Eropa lainnya. Sehingga demi memperluas pengaruh Prancis di kawasan Eropa, Presiden Macron menggunakan pendekatan politik untuk menjadikan industri pertahanan Prancis sebagai partner penting dalam pengembangan pertahanan Eropa daripada menggunakan industri pertahanan Amerika Serikat.¹²

Untuk pasar global, pada tahun 2017-2021 Prancis menempati posisi ketiga sebagai eksportir persenjataan terbesar di dunia dan menempati posisi kedua setelah Rusia untuk kawasan Eropa. Tujuan ekspor persenjataan Prancis terbesar dalam rentang waktu ini adalah kawasan Asia dan Oseania dengan jenis ekspor terbesar adalah pesawat tempur sebanyak 102 pesawat tempur dan ini belum termasuk kesepakatan ekspor 188 pesawat tempur ke beberapa negara, salah

¹⁰ "Defence industries and technologies," Ministère De L'Europe Et Des Affaires Etrangères, diakses pada 19 Agustus 2022, <https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/economic-diplomacy-foreign-trade/supporting-french-businesses-abroad/strategic-sector-support/defence-industries-and/>

¹¹ "The French Defence Sector, A Market That Does Not Suffer From The Crisis," Surfeo, diakses pada 19 Agustus 2022., <https://surfeo.eu/the-french-defence-sector-a-market-that-does-not-suffer-from-the-crisis/>

¹² Charlotte Le Breton, Tom Waldwyn, "French defence exports to Europe: past, present and Future," IISS (The International Institute for Strategic Studies) (Juli 2022), Hlm 5, <https://www.iiss.org/blogs/research-paper/2022/07/french-defence-exports-to-europe-past-present-and-future>

satunya Indonesia sebanyak 42 pesawat tempur.¹³

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia selama tiga tahun terakhir dan invasi Rusia ke Ukraina pada awal tahun 2022 menyebabkan perekonomian dunia menjadi lebih buruk termasuk bagi Prancis sendiri.¹⁴ Namun karena peningkatan anggaran pertahanan di Uni Eropa dan pada tahun 2019 dibentuk *European Defence Fund*, membuat Prancis sebagai salah satu pemimpin dalam industri pertahanan dunia menghasilkan 36% peningkatan kerja sama dengan negara Eropa antara tahun 2019 sampai 2025. Hal ini mengakibatkan penurunan kondisi ekonomi dunia tidak berpengaruh banyak bagi industri pertahanan Prancis, malah industri pertahanan mengalami pertumbuhan positif berkat kerja sama-kerja sama yang dihasilkan selama pandemi terjadi. .

Dari perusahaan Airbus, disaat banyak pesawat dilarang terbang selama pandemi, unit keseratus dari pesawat airbus jenis A400M akan dikirim ke angkatan udara Spanyol di Zaragoza. Perusahaan Dassault Aviation juga mencatat kerja sama pembelian puluhan unit Rafale dalam tahun 2021. Untuk sektor amunisi, perusahaan Nexter dan MBDA memunculkan banyak program baru yang disepakati dengan negara eropa lainnya.¹⁵

¹³ SIPRI, "Trends In International Arms Transfers 2021," 11 April 2022,

<https://doi.org/10.55163/CBZJ9986>

¹⁴ "Challenging times for the French Defence Industry," European Security & Defence, diakses pada 20 Agustus 2022, <https://euro-sd.com/2022/09/articles/industry/27180/challenging-times-for-the-french-defence-industry/>

¹⁵ "The French Defence Sector, A Market That Does Not Suffer From The Crisis,"

Dari penjelasan perkembangan industri pertahanan Prancis diatas maka Prancis termasuk kedalam *Autarky Model* model tipologi industri pertahanan sehingga dengan kapasitas dan kemajuan teknologi ini membuat Indonesia memilih Prancis menjadi mitra kerja sama pertahanan dalam pengembangan kapasitas industri pertahanan dalam negeri Indonesia.

Sejarah industri pertahanan Indonesia

Industri Pertahanan adalah industri nasional yang terdiri atas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menghasilkan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam), jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Industri Pertahanan memiliki tugas untuk membangun kemampuan dalam menghasilkan. Alpalhankam.¹⁶

Industri Pertahanan Nasional sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda, dimana awalnya didirikan untuk kebutuhan Belanda yang memerlukan sarana pemeliharaan dan perbaikan bagi peralatan perang mereka dan kemudian berkembang untuk menghasilkan produk-produk alat peralatan pertahanan dan peralatan pendukungnya, yang

Surfeo, diakses pada 19 Agustus 2022., <https://surfeo.eu/the-french-defence-sector-a-market-that-does-not-suffer-from-the-crisis/>

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan <https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/migrasi/peraturan/UU0162012.pdf>

meliputi kendaraan tempur darat, kapal perang, pesawat, senjata, dan amunisi. Beberapa pabrik inilah dikemudian hari menjadi cikal bakal perusahaan pertahanan dalam negeri saat ini.

Dua contoh perusahaan yang dimaksud seperti PT Pindad dan PT Dirgantara. PT. Pindad yang awalnya merupakan bengkel persenjataan bernama *Contructie Winkel* (CW) milik Belanda yang kemudian diambil alih Indonesia menjadi Pabrik Alat Peralatan Angkatan Darat pada tahun 1948, kemudian bertransformasi kembali pada tahun 1983 menjadi PT. Pindad yang dikenal sekarang. Contoh lain perusahaan yang berasal dari masa penjajahan adalah PT. Dirgantara Indonesia, berawal dari pembangunan Bagian Uji Terbang di Surabaya pada 1914, kemudian pembangunan Bagian Produksi Pesawat pada 1930 menjadi cikal bakal pengembangan pesawat lokal di Indonesia. Setelah kemerdekaan, biro Perencanaan & Konstruksi didirikan TNI AU untuk membuat lokakarya pembuatan pesawat. Setelah melewati banyak dinamika pada 11 Oktober 1985 didirikan PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) yang menjadi langkah awal pertumbuhan industri pesawat terbang modern dan lengkap di Indonesia dan setelah menguasai ilmu pembuatan pesawat kecil dan menengah pada 24 Agustus 2000, IPTN melakukan restrukturisasi dan berubah nama menjadi PT. Dirgantara Indonesia hingga sekarang.

Perusahaan-perusahaan ini mengalami pasang surut dalam perkembangannya. Seperti pada tahun 1980-an Industri Pertahanan Nasional mengalami masa keemasan

karena seluruh industri dikonsolidasikan di bawah Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS) Namun terjadinya krisis moneter di Indonesia tahun 1987 membuat Industri Pertahanan Nasional tidak berkembang lagi. Kesepakatan yang dilakukan oleh pemerintah saat itu dengan *International Monetary Fund* (IMF) untuk memulihkan kondisi ekonomi Indonesia berdampak pada berhentinya pendanaan negara untuk industri strategis nasional dan peningkatan nilai saham yang dilepas ke umum yang mengakibatkan industri strategis termasuk sektor pertahanan tidak lagi dalam pengawasan pemerintah.

Untuk mengembalikan ketertinggalan kemampuan dan inovasi Industri Pertahanan dari perkembangan industri pertahanan dunia serta mengurangi ketergantungan Indonesia akan Alutsista buatan luar negeri, pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono mulai menjadikan industri pertahanan sebagai prioritas pembangunan. Pemerintah mengakomodasi dan memberi peluang besar bagi keterlibatan pihak swasta dalam pengembangan Industri Pertahanan. Langkah selanjutnya yang diambil adalah pembuatan KKIP (Komite Kebijakan Industri Pertahanan) melalui Perpres No.42/2010 tentang Komite Kebijakan Industri Pertahanan, kemudian dilanjutkan dengan keluarnya Undang-undang Nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.¹⁷

Undang-Undang ini mendorong perkembangan dan

¹⁷ "Sejarah Industri Pertahanan Nasional," Komite Kebijakan Industri Pertahanan, diakses pada 11 Februari 2023, <https://www.kkip.go.id/sejarah/#>

pertumbuhan industri-industri padat modal, padat karya dan padat teknologi dalam sektor industri pertahanan yang dipimpin oleh BUMN industri pertahanan. Hingga tahun 2019, Kementerian Pertahanan RI sudah menetapkan 110 industri pertahanan (BUMN dan BUMS). BUMN industri pertahanan Indonesia telah memproduksi beberapa Alutsista yang telah digunakan oleh TNI dan Polri diantaranya adalah Anoa dari PT. Pindad, CN-235 dan NC21 dari PT. DI, Kapal Patroli Cepat 28 m, Kapal KCR 60 m, Kapal Landing Platform Dock (LPD) dari PT. PAL. Namun penguasaan teknologi saat ini masih belum memenuhi kebutuhan negara secara mandiri karena terbatasnya infrastruktur dasar industri pertahanan dalam negeri dan rendahnya investasi dalam pengembangan riset ilmu untuk menunjang industri pertahanan. Untuk mengatasi ketertinggalan penguasaan teknologi maka dalam setiap belanja Alutsista dari luar negeri harus melibatkan partisipasi industri pertahanan dalam bentuk Kandungan Lokal dan Ofset (KLO) maupun alih teknologi (ToT), yang menjadi kesempatan untuk membangun kemampuan industri pertahanan agar memiliki kemampuan yang mumpuni. Masalah lain yang dihadapi adalah minimnya peran BUMS dalam industri pertahanan karena sebagian besar perusahaan ini terkendala dalam permodalan.

Kebijakan lain yang dilakukan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan Alutsista dan mendorong perkembangan industri pertahanan adalah kebijakan MEF (*Minimum Essential Force*) yang diartikan sebagai standar minimum kekuatan

yang harus dimiliki TNI agar mampu menjalankan misinya secara efektif dalam menghadapi ancaman bagi negara. MEF mulai dicanangkan oleh Pemerintah sejak tahun 2007, selanjutnya kebijakan MEF mulai dilaksanakan sejak tahun 2009 yang terbagi dalam tiga fase yaitu fase pertama 2010-2014, fase kedua 2015-2019, dan fase ketiga 2020-2024. Salah satu sarana untuk mewujudkan MEF adalah melalui pengembangan industri militer dalam negeri.¹⁸

Melalui kebijakan MEF dan peraturan perundang-undangan yang ada inilah yang menjadi dasar hukum dan capaian target Indonesia untuk memenuhi kebutuhan Alutsista dan perkembangan industri pertahanannya.

Perusahaan dalam industri pertahanan Indonesia

Industri Pertahanan Indonesia terbagi dua yaitu BUMN dan BUMS. Beberapa nama perusahaan yang termasuk dalam industri ini adalah PT. Pindad, PT. PAL Indonesia, PT. Dirgantara Indonesia, PT. Nusantara Turbin Dan Propulsi, PT. Len Industri, PT. INTI, PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari, PT. Dahana. Perusahaan-perusahaan ini bergerak dalam bidang pembuatan amunisi, senjata, bahan peledak, jaringan komunikasi dan kendaraan tempur matra darat, laut, dan udara.

¹⁸ Ervita L. Zahara, Arjun Rizky M.N, "Anggaran Pertahanan Indonesia : Pemenuhan *Minimum Essential Force*," *Analisis Ringkas Cepat* No. 04/arc.PKA/IV/2020 (April 2020), Hlm. 4-5, <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/analisis-ringkas-cepat/public-file/analisis-ringkas-cepat-public-28.pdf>

Perkembangan industri pertahanan Indonesia

Kemhan dan TNI sedang berupaya merealisasikan prioritas nasional yang diwujudkan dalam kegiatan pembangunan dan pengembangan industri pertahanan karena saat ini kita masih tergantung dengan produk Alutsista luar negeri sedangkan industri pertahanan dalam negeri belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan seperti pesawat tempur, kapal perusak, roket, rudal, dan radar. Padahal dalam pengadaan Alutsista haruslah megutamakan produksi industri pertahanan dalam negeri.¹⁹

Untuk mengejar ketertinggalan dalam kemampuan produksi Alutsista dalam negeri maka disusunlah kebijakan pengembangan industri pertahanan dalam negeri diatur yang dalam Undang-Undang 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Dalam UU tersebut BUMN industri pertahanan bertugas sebagai pemimpin integrator pembangunan Alutsista. Hingga 2019, Kemhan sudah menetapkan 110 industri pertahanan baik BUMN maupun BUMS.²⁰ Namun BUMN dan BUMS ini masih mengalami kendala berupa rendahnya investasi dalam penelitian dan pengembangan

teknologi Alutsista dan minimnya peran BUMS dalam industri ini karena terkendala modal dalam pengembangan usahanya.

Merujuk pada RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan kontribusi industri pertahanan dalam pemenuhan kebutuhan Alutsista adalah diatas 50% sehingga untuk mewujudkannya pemerintah menyusun *Master Plan* pembangunan industri pertahanan dalam rentang waktu 2010-2029 dengan tujuan agar industri pertahanan menjadi mandiri, memiliki kemampuan berkolaborasi secara internasional dan dapat berkembang secara berkelanjutan sehingga mampu memenuhi pasar dalam negeri, dapat bersaing dengan produk luar negeri serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi menuju industri pertahanan yang mandiri. Untuk mencapai kemandirian itu industri pertahanan dalam negeri membutuhkan alih teknologi (ToT) dan *ofset* dari industri pertahanan luar negeri.

Untuk Indonesia sendiri, model yang digunakan adalah *Niche-Production Model* dengan pengembangan industri pertahanan melalui MEF, dan peraturan dalam pembelian Alutsista dari luar negeri.

²¹ Kerja sama pembelian Alutsista dari luar negeri harus melibatkan industri pertahanan dalam negeri dalam pengadaannya, mendapatkan alih teknologi dari Alutsista yang dibeli, adanya kandungan lokal dan

¹⁹ "Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perencanaan Kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia," 5 Januari 2023,

<https://jdihn.go.id/files/1250/83dda37509810479d54eb0fbd8a0abc3.pdf>

²⁰ Ervita L. Zahara, Arjun Rizky M.N, "Anggaran Pertahanan Indonesia : Pemenuhan *Minimum Essential Force*," *Analisis Ringkas Cepat* No. 04/arc.PKA/IV/2020 (April 2020), Hlm. 5, <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/analisis-ringkas-cepat/public-file/analisis-ringkas-cepat-public-28.pdf>

²¹ Utaryo Santiko, Maria Davina Agustien, "Kerja sama Industri Pertahanan Indonesia Dan Perancis Dalam Memenuhi Minimum Essential Force (MEF) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Tahun 2015 - 2019." *Moestopo Journal International Relations* Vol 2, No 1 (Maret 2022) hlm. 80, <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/mjir/article/view/2066/936>

offset paling rendah 35% serta jaminan tidak adanya embargo dari negara tersebut di kemudian hari yang mempengaruhi Alutsista yang dibeli Indonesia.²²

Salah satu mitra kerja sama pertahanan Indonesia dalam mengembangkan industri pertahanan adalah Prancis. Hal ini terlihat dalam pertemuan bilateral menteri pertahanan kedua negara yang terjadi pada 2022. Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Menteri Angkatan Bersenjata Republik Prancis H.E. Mrs. Florence Parly pada 10 Februari 2022 di Kementerian Pertahanan, Jakarta. Pertemuan bilateral ini menghasilkan penandatanganan beberapa perjanjian kerja sama antara perusahaan pertahanan yang disaksikan langsung oleh Menteri Pertahanan kedua negara, antara lain:

- MoU pengadaan 6 pesawat tempur Rafale antara Kabanahan Kemhan dengan Dassault Aviation
- MoU kerja sama di bidang *research and development* kapal selam antara PT PAL dengan Naval Group
- MoU kerja sama program *Offset* dan ToT antara PT Dirgantara Indonesia dengan Dassault Aviation
- MoU kerja sama di bidang telekomunikasi antara PT LEN dengan Thales Group
- MoU kerja sama pembuatan munisi kaliber besar dan

menengah antara PT Pindad dengan Nexter Munition

Berdasarkan pandangan duta besar Prancis untuk Indonesia, Prancis dalam kerja sama berkomitmen dengan Indonesia dalam berbagi teknologi yang mereka miliki dalam bentuk *research and development, maintenance, reparation, overhaul* di dalam negeri, pengalihan sumber daya dan kapasitas dari industri pertahanan Prancis dan industri pertahanan dalam negeri melalui mekanisme ToT, pelatihan SDM, *offset*, dan produksi lokal. Semua kesepakatan kerja sama yang ditandatangani pada 10 Februari 2022 lalu juga sesuai dengan kebutuhan Indonesia dalam mengembangkan industri pertahanan dalam negeri sendiri karena semuanya memberikan pengembangan kapabilitas bagi industri pertahanan dalam negeri.²³

PENUTUP

Kemandirian industri pertahanan sangat penting bagi sebuah negara. Untuk memajukannya sebagian negara perlu melakukan kerja sama dengan negara lain. Indonesia yang masih banyak bergantung dengan impor dari negara lain juga melakukan kerja sama tersebut dan negara yang menjadi mitra pada tahun 2022 adalah Prancis.

Kesempatan dan akses teknologi yang diberikan Prancis dalam kerja sama ini tentu akan membantu Indonesia dalam

²² “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan,” 14 Desember 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39088/uu-no-16-tahun-2012>

²³ H.G Olivier Chambard, “Blak-blakan Prancis Usai Indonesia Borong Pesawat Pesawat Rafale,” wawancara oleh Monika Chua, Prime words CNBC Indonesia, 25 Februari 2022 <https://www.youtube.com/watch?v=kzAJboGWSKM>

melakukan riset dan pengembangan teknologi alutsista bagi industrinya sendiri karena misalnya dalam perkembangan pesawat tempur yang sudah memasuki generasi kelima, Indonesia sendiri masih bergantung pesawat generasi ke empat. Sehingga kerja sama dan pembelian pesawat Rafale akan membantu mengejar ketertinggalan dengan memiliki pesawat generasi 4,5.

DAFTAR PUSTAKA

Breton, Charlotte Le. Tom Waldwyn. "French defence exports to Europe: past, present and Future." *IISS (The International Institute for Strategic Studies)* (July 2022): 1-24.
<https://www.iiss.org/blogs/research-paper/2022/07/french-defence-exports-to-europe-past-present-and-future>

European Security & Defence. "Challenging times for the French Defence Industry." Diakses pada 20 Agustus 2022. <https://euro-sd.com/2022/09/articles/industry/27180/challenging-times-for-the-french-defence-industry/>

H.G Olivier Chambard. "Blak-blakan Prancis Usai Indonesia Borong Pesawat Pesawat Rafale." Diwawancarai oleh Monika Chua, *Prime Words*, CNBC Indonesia, 25 Februari 2022.
<https://www.youtube.com/watch?v=kzAJboGWSKM>

Komite Kebijakan Industri Pertahanan. "Sejarah Industri Pertahanan Nasional." Diakses pada 11 Februari 2023.
<https://www.kkip.go.id/sejarah/#>

L, Ervita Zahara. Arjun Rizky M N. "Anggaran Pertahanan Indonesia : Pemenuhan Minimum Essential Force." *Analisis Ringkas Cepat* No. 04/arc.PKA/IV/2020 (April 2020): 1-6.
<https://berkas.dpr.go.id/puskajiang-garan/analisis-ringkas-cepat/public-file/analisis-ringkas-cepat-public-28.pdf>

Guillou, Sarah. Dkk. "The French defence industry in the knowledge management era: A historical overview and evidence from empirical data." *Research Policy* (2009): 170-180.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048733308002345>

Mas'oed, Mohtar, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*. Jakarta : LP3ES, 1990.

Ministere De L'Europe Et Des Affaires Etrangeres. "Defence industries and technologies." Diakses pada 19 Agustus 2022.
<https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/economic-diplomacy-foreign-trade/supporting-french-businesses-abroad/strategic-sector-support/defence-industries-and/>

Swedish Ministry of Defence. "The development of the French defence industry in the 20th century." 2005.
<https://www.foi.se/rest-api/report/FOI-R--1573--SE>

SIPRI. "Trends In International Arms Transfers 2021." 11 April 2022,.

<https://doi.org/10.55163/CBZJ9986>

U.S. Congress, Office of Technology Assessment. *Lessons in Restructuring Defense Industry: The French Experience-Background Paper*. Washington DC: U.S. Government Printing Office, June 1992.

Santika, Utaryo. Maria Davina Agustien. “Kerja sama Industri Pertahanan Indonesia Dan Perancis Dalam Memenuhi Minimum Essential Force (MEF) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Tahun 2015 - 2019.” *Moestopo Journal International Relations* Vol 2, No 1 (Maret 2022): 77-90
.
<https://journal.moestopo.ac.id/index.php/mjir/article/view/2066/936>

Surfeo. “The French Defence Sector, A Market That Does Not Suffer From The Crisis.” Diakses pada 19 Agustus 2022.
<https://surfeo.eu/the-french-defence-sector-a-market-that-does-not-suffer-from-the-crisis/>

Sutedjo, Rus Nurhadi. “Peningkatan Tata Kelola Industri Pertahanan Guna Mengoptimalkan Fungsi Pertahanan Negara Dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI.” Lembaga Ketahanan Nasional RI, 2014.
<http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-011600000000287/swf/6122/mobile/index.html#p=1>

“Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 Tentang

Penyelenggaraan Perencanaan Kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.” 5 Januari 2023.

<https://jdihn.go.id/files/1250/83dda37509810479d54eb0fbd8a0abc3.pdf>

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan.” 14 Desember 2022.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39088/uu-no-16-tahun-2012>